

REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2020

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 2. VISI** : Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa.
- 3. MISI** :
1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri
 2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan
 3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat
 4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan
 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2020 (RIBU)
01	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	133.500.275,0
03	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	35.000.000,0
04	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	1.250.000,0
05	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	139.590.762,0
Total		309.341.037,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2020	ALOKASI 2020 (RIBU)
01	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, serta politik dalam negeri		245.773.691,0
01.01	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilukada dan pemilu	77,5%	
01.02	Indeks Kinerja Ormas	Skor 60	
01.03	Penurunan peristiwa konflik sosial setiap tahunnya	≤ 83 Peristiwa	
01.04	Peningkatan indeks demokrasi Indonesia	Skor 75	
02	Peningkatan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat		90.017.364,0
02.01	Jumlah Pemilihan Kepala Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	270 daerah	
02.02	Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	34 Provinsi	
02.04	Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai PP 18 Tahun 2016	34 Provinsi	
03	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Urusan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		234.210.165,0
03.01	Jumlah daerah yang menerapkan SPM	34 Provinsi	
03.02	Jumlah daerah yang telah menyusun dokumen perencanaan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	5 Provinsi	
03.03	Jumlah daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Prioritas Urusan	34 Provinsi	
04	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah		80.690.866,0
04.01	Jumlah Provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	32 Provinsi	
04.02	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90% dari total belanja yang ditetapkan dalam APBD	284 Daerah	
04.03	Jumlah daerah yang pendapatan pajak dan retribusi daerahnya meningkat sebesar minimal 3% pada Provinsi dan 5% pada Kabupaten/Kota	300 Daerah	
05	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Wilayah		244.534.546,0
05.01	Indeks kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas dan wilayah	Indeks 0,2	
06	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa		260.126.498,0
06.01	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5000 Desa	
07	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya		788.412.970,0
07.01	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	548 Daerah	
07.02	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	42 K/L	
07.03	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	270 daerah	
08	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		468.199.585,0
08.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	86%	
09	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah		76.737.754,0
09.01	Nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan Kementerian Dalam Negeri	Kategori Baik	
09.02	Nilai Akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah	Kategori Baik	
10	Peningkatan kualitas kebijakan pemerintahan dalam negeri berbasis hasil Kelitbangan, dan penerapan inovasi daerah		56.862.486,0
10.01	Indeks kemanfaatan hasil kelitbangan	Nilai 60	
10.02	Persentase daerah yang meningkat nilai indeks inovasi daerah	10%	
11	Meningkatnya kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		209.292.674,0
11.01	Persentase Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang tersertifikasi	40%	
12	Peningkatan Kualitas Pendidikan Kepamongpraajaan		676.436.370,0
12.01	Penerapan Smart Campus di lingkungan IPDN	25	
12.02	Peningkatan Nilai AKreditasi Program Studi dan Institut	Minimal Kategori B	

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2020	ALOKASI 2020 (RIBU)
12.03	Persentase lulusan IPDN berpredikat Cumlaude dan bersertifikat Kompetensi	18% (DIV dan S1), 20% (S2), 50% (S3), dan 4% (Profesi)	
Total			3.431.294,969,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2021	2022	2023
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
010.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	468.199.585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	468.199.585,0	498.402.347,0	513.876.271,0	530.565.216,0
010.02.03	Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	76.737.754,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76.737.754,0	79.081.750,0	81.497.348,0	83.986.762,0
010.11.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	56.862.486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56.862.486,0	57.690.748,0	59.709.929,0	61.421.938,0
010.12.05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	180.975.029,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.317.645,0	0,0	0,0	0,0	209.292.674,0	221.665.533,0	231.175.859,0	242.219.945,0
010.06.06	Program Bina Pembangunan Daerah	130.184.699,0	0,0	80.547.982,0	0,0	23.477.484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234.210.165,0	136.862.631,0	156.199.224,0	158.096.215,0
010.07.07	Program Bina Otonomi Daerah	90.017.364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90.017.364,0	128.191.980,0	159.249.980,0	180.711.000,0
010.04.08	Program Bina Administrasi Kewilayahan	244.534.546,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244.534.546,0	268.818.001,0	695.408.799,0	324.580.628,0
010.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	80.690.866,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.690.866,0	86.634.559,0	92.585.699,0	98.597.959,0
010.08.10	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	788.412.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	788.412.970,0	815.297.853,0	843.099.509,0	871.849.249,0
010.03.11	Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	245.773.691,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245.773.691,0	66.811.055,0	68.161.670,0	48.218.401,0
010.01.12	Program Pendidikan Kepamongprajaan	665.877.331,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.559.039,0	0,0	0,0	0,0	676.436.370,0	628.306.102,0	642.896.534,0	662.941.055,0
010.05.13	Program Bina Pemerintahan Desa	232.874.084,0	0,0	27.243.240,0	0,0	0,0	0,0	9.174,0	0,0	0,0	0,0	260.126.498,0	239.383.347,0	247.689.740,0	261.422.019,0
Total		3.261.140.405,0	0,0	107.791.222,0	0,0	23.477.484,0	0,0	38.885.858,0	0,0	0,0	0,0	3.431.294.969,0	3.227.145.906,0	3.791.550.562,0	3.524.610.387,0